



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	10/04/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10/04/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10/04/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	10/04/2025	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	10/04/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/04/2025	



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**



• KATA

PENGANTAR



KATA PENGANTAR



BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Palembang, 11 April 2025

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN**



Ditandatangani secara elektronik
NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT
NIP. 19711116 199803 1 002





• RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi Presiden RI dirumuskan dalam 8 (delapan) Misi Astacita, dengan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat. Pencapaian visi Kabinet Merah Putih tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung Visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2025 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 berpedoman kepada Visi Presiden terlantik dalam RPJMN dan Visi Renstra Kementerian Perhubungan.

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 memiliki peran penting sebagai pondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tecermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

UU No.59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjelaskan pengertian Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaan.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah "**Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**". Empat pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari:

- Bersatu dimaknai sebagai kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
- Berdaulat dimaknai sebagai ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh;
- Maju dimaknai sebagai berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil; dan
- Berkelanjutan dimaknai sebagai lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Presiden Republik Indonesia menjadi landasan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

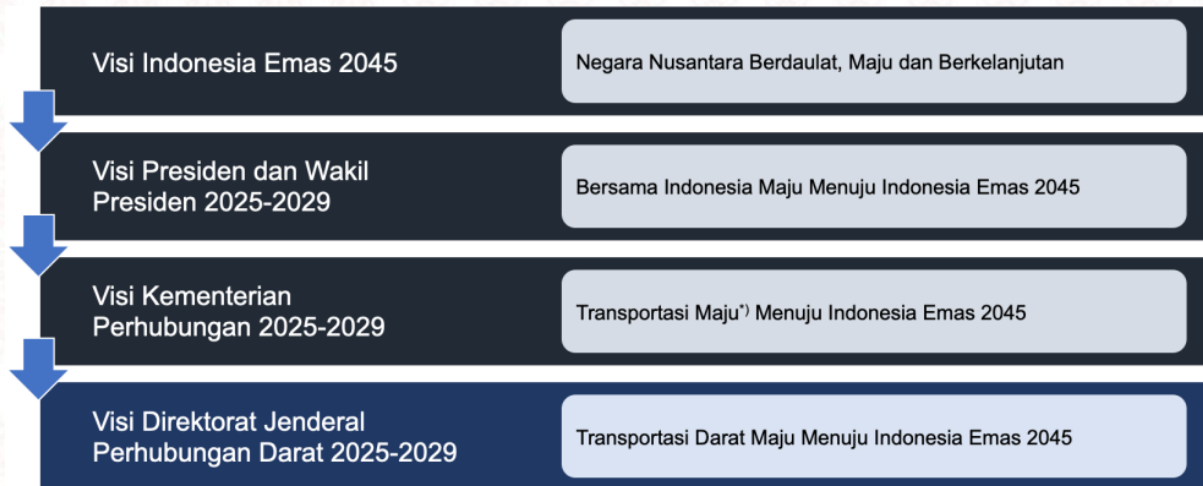
Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah "**Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045**".





Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, dan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah **"Transportasi Darat Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Pemaknaan transportasi darat Indonesia maju dengan mengacu pada uraian Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, yaitu: tersedianya jaringan dan layanan transportasi darat yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.



Gambar 1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Keterangan: *) Transportasi maju: tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan

Misi menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi Presiden RI dirumuskan dalam 8 (delapan) Misi Astacita, dengan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat. Delapan Misi Asta Cita adalah sebagai berikut:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan





8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan fungsi Kementerian Perhubungan mengacu pada Perpres No. 173 Tahun 2025 tentang Kementerian Perhubungan. Misi Kementerian Perhubungan dirumuskan dengan mempersempit lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dengan fokus utama pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi; dan
- b. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 disusun dengan membuat pasangan untuk setiap misi pada Asta Cita sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional; dan
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.	1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan	1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan	4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama	5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau	6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional	7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Gambar 2. Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disajikan pada **Gambar 2** adalah sebagai berikut:





1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat; dan
8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan sasaran pada periode jangka menengah 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan *balanced scorecard* atau BSC. Penggunaan *balanced scorecard* mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

- T.1 Terwujudnya nilai tambah transportasi darat untuk mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045;
- T.2 Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
- T.3 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas; dan
- T.4 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Adapun sasaran Kementerian Perhubungan sebagaimana dihasilkan dari proses analisis *balanced scorecard* mencakup:

- SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
- SS2 Meningkatnya kualitas dan inklusivitas pelayanan transportasi nasional;
- SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
- SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional;
- SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
- SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

Pengertian sasaran atau target menurut PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Direktorat Jenderal Perhubungan sebagai unit kerja eselon 1 menggunakan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai alat ukur dalam pencapaian tujuan. Sasaran Program juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis yang telah disusun dalam Renstra Kementerian Perhubungan.





Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- SP1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat;
- SP2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;
- SP3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
- SPp4. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat;
- SPp5. Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten;
- SPp6. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Hubdat.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Sasaran Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan sasaran kegiatan pada tahun sebelumnya dikarenakan belum disahkannya Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dimana terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 6,56 (target 100,0);
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 16,51 (target 100,0);
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 32,14 (target 25,0);
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 61,51 (target 60,0);
7. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0,0 (target 80,0);
8. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 12,43 (target 16,0);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0,0 (target 1000,0);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 82,35 (target 82,0);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 29,60 (target 90,0); dan
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 55,0 (target 85,0).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar **64,92%**, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.





Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA SAMBUTAN	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Sumber Daya Manusia	5
I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	6
I.4 Sistematika Laporan	10
I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	23
II.1 Akuntabilitas Kinerja	23
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	25
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	27
a.1 Definisi Indikator Kinerja	27
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	28
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	29
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	31
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	32
a.1 Definisi Indikator Kinerja	32
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	32
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	33
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	35
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	35
a.1 Definisi Indikator Kinerja	35
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	36

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	36
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	38
IKK. 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.....	39
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	39
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	39
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	40
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	41
SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	42
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	42
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	45
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	46
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	48
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	48
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	48
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	55
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	55
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	58
SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	58
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	59
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	59
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	60
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	62
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	63
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	62
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	63
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	64
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	67
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	67
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	67

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	67
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	68
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	70
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	70
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	71
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	71
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	73
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	74
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	74
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	75
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	76
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	78
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	79
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	79
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	80
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	81
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	83
II.3 REALISASI ANGGARAN	83
II.2.1.1 Pagu Anggaran	83
II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025.....	84
II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2024	86
II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	88
II.2.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	88
II.2.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	89
II.2.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	90
II.2.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	92
II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	93
II.2.4 Hambatan dan Kendala	94
PENUTUP	96
III.1 Penutup.....	96

III.1.1 Ringkasan Capaian	96
III.1.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Penanggung Jawab	97
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai <i>Draft</i> Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029	14
Tabel I.2	Rencana Kinerja Tahun 2025	17
Tabel I.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel II.1	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel II.2	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	30
Tabel II.3	Aspek Penilaian Persentase Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Keselamatan, Keamanan, dan Kehandalan/Keteraturan)	42
Tabel II.4	Aspek Penilaian Persentase Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan, dan Kesetaraan)	43
Tabel II.5	Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan	46
Tabel II.6	Konversi Nilai Pelayanan	46
Tabel II.7	Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP	48
Tabel II.8	Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	55
Tabel II.9	Konversi Nilai Pelayanan	55
Tabel II.10	Kebutuhan Item Perlengkapan Jalan Berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID)	59
Tabel II.11	Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati) Triwulan I Tahun 2025	63
Tabel II.12	Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun 2025	70
Tabel II.13	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	72
Tabel II.14	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	75
Tabel II.15	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	77
Tabel II.16	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	79

Tabel II.17	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	80
Tabel II.18	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	80
Tabel II.19	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I Tahun 2025	81
Tabel II.20	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan I Tahun 2025	81
Tabel II.21	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025	81
Tabel II.22	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025	82
Tabel II.23	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025	82
Tabel II.24	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025	83
Tabel II.25	Kegiatan Program Yang Ada Dalam DIPA Tahun 2025	85
Tabel II.26	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025	86
Tabel II.27	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025	87
Tabel II.28	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	89
Tabel II.29	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	89
Tabel II.30	Efisiensi Anggaran	90
Tabel III.1	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	28
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	32
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	35
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	38
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	44
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	53
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	61
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	65
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	73
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	77
Gambar II.13	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025	84
Gambar II.14	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4. Rencana Aksi Tahun 2025

Lampiran 5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, *Akuntable*, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.



I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat semula terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023. Selanjutnya terdapat perubahan jumlah lokasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha meliputi Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Prasarana meliputi Seksi Prasarana Jalan dan Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan;
3. Bidang Sarana dan Angkutan meliputi Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan meliputi Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

I.1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian, satuan pelayanan dan kelompok jabatan fungsional pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.2 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada Tahun 2025 meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 203 Orang;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 15 Orang;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 4 Orang; dan
- d. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 240 Orang.

I.3 Potensi Isu Strategis Permasalahan

I.3.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh Lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

I.3.2 Isu Strategis

- A. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas

pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Lembaga pengembangan sumber daya manusia.

B. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan LRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien,

ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakandan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

I.3.3 Permasalahan

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan yang rendah; rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - c) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;

3. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a. Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b. Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - c. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
 - d. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
 - e. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - a) Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran, sungai dan danau;
 - b) Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - c) Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
 - d) Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
 - f. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - a) Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;

- b) Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - c) Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
 - d) Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
 - e) Kemacetan lalu lintas;
 - f) Pelayanan angkutan umum belum memadai;
 - g) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- g. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
- a) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - b) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - c) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 - d) Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I.4 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II Akuntabilitas Kinerja

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK. 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

II.3 Realisasi Anggaran

III.3.1Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

III.3.2Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai Draft Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	1	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	7	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	6	6	6	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	50	55	55	55	55
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50	55	55	55	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	30	30	30	50	50
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	90	90	90
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	55	50	50	45	40
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	1	2	1	1	2
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1400	1500	1500	1600	1600
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82,35	88,2	88,2	94,1	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	1	1	1
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90	90	90
WA			PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	90

I.5.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat.

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 167.139.126.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutam penyeberangan	%	100

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan strategis yang tertuang dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PAGU TAHUNAN	TRIWULAN I					
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						55,77%			139,19%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	4.289.575.000	100,00	6,56	6,56%	1.072.393.750	1.941.614.955	181,05%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	12.664.171.000	7,00	7,00	100,00%	3.166.042.750	3.040.557.986	96,04%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	3.628.283.000	100,00	16,51	16,51%	907.070.750	1.779.676.000	196,20%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	2.840.280.000	7,00	7,00	100,00%	710.070.000	592.749.013	83,48%
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat						115,54%			48,02%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	12.664.171.000	25,00	32,14	128,56%	3.166.042.750	3.040.557.986	96,04%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	8.800.000	60,00	61,51	102,52%	2.200.000	0,00	0,00%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat						55,69%			21,15%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	20.186.000.000	80,00	0,00	0,00%	5.046.500.000	0,00	0,00%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	3.241.457.000	16,00	12,43	122,31%	810.364.250	685.581.120	84,60%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	357.143.000	1000,00	0,00	0,00%	89.285.750	0,00	0,00%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	341.000.000	82,00	82,35	100,43%	85.250.000	0,00	0,00%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						32,89%			1,36%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	38.538.731.000	90,00	29,60	32,89%	9.634.682.750	131.171.990	1,36%
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						64,71%			111,38%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	32.484.581.000	85,00	55,00	64,71%	8.121.145.250	9.045.152.462	111,38%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan							64,92%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan							68,91%			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						6				
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						6				



Selama Tahun 2025, ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 (Dua Belas) IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan direncanakan, dan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam IKK membangun negara sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan;
2. IKK 1.3 : Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi;
3. IKK 1.5 : Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan; dan
4. IKK 1.6 : Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan bahwa Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu, dimana pemberian subsidi ini dengan tujuan:

1. Stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
2. Meningkatkan minat penggunaan angkutan umum; dan
3. Kemudahan mobilitas Masyarakat di Kawasan Perkotaan.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah rit (Km) pada kegiatan subsidi operasional keperintisan angkutan jalan di Provinsi Sumatera Selatan terhadap target yang telah ditetapkan. Rit adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

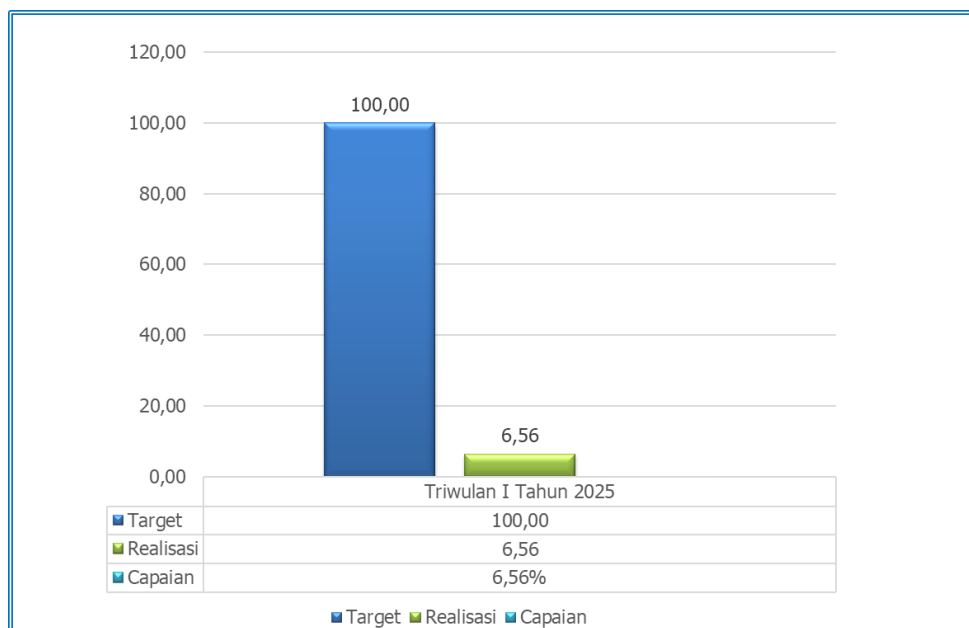
$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional}$$

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rit pada tahun (n)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6,56% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100, maka capaian kinerja mencapai 6,56%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.



Gambar II.1. Grafik Capaian IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, sebanyak 3 (tiga) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun rute angkutan perintis sebagai berikut:

1. Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar;
2. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung;
3. Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir; dan
4. Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang (trayek ini belum berjalan dikarenakan kendaraan tidak bisa masuk karena ada portal, selanjutnya direncanakan akan dilakukan penggantian bus kecil tetapi menunggu jawaban dari Direktorat Teknis).

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi pada Tahun 2025 memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum; dan
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang terjangkau.

▪ **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan; dan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi rit}}{\text{Jumlah target rit}} \text{ (dalam satuan \%)}$$

$$\% \text{ Realisasi Kinerja} = \frac{100}{1.525} \times 100\% = 6,56\%$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam 1 (satu) tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Trayek	Target Volume (1 Tahun)	Satuan	Total Realisasi s.d. Triwulan I	%
1.	Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar	610	Rit	53	8,68%
2.	Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung	305	Rit	29	9,50%
3.	Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir	305	Rit	18	5,90%
4.	Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang	305	Rit	0	0
Total		1.525	Rit	100	6,56%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2025)

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{6,56}{100} \times 100\% = 6,56\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.289.575.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.941.614.955,- atau mencapai 45,3%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan; dan
4. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara berkala.

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal Barang yang beroperasi merupakan terminal barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Jumlah terminal yang dihitung hanya jumlah terminal tipe A, dikarenakan tidak terdapat terminal barang di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Terminal Tipe A yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebanyak 7 (tujuh) lokasi, sebagai berikut:

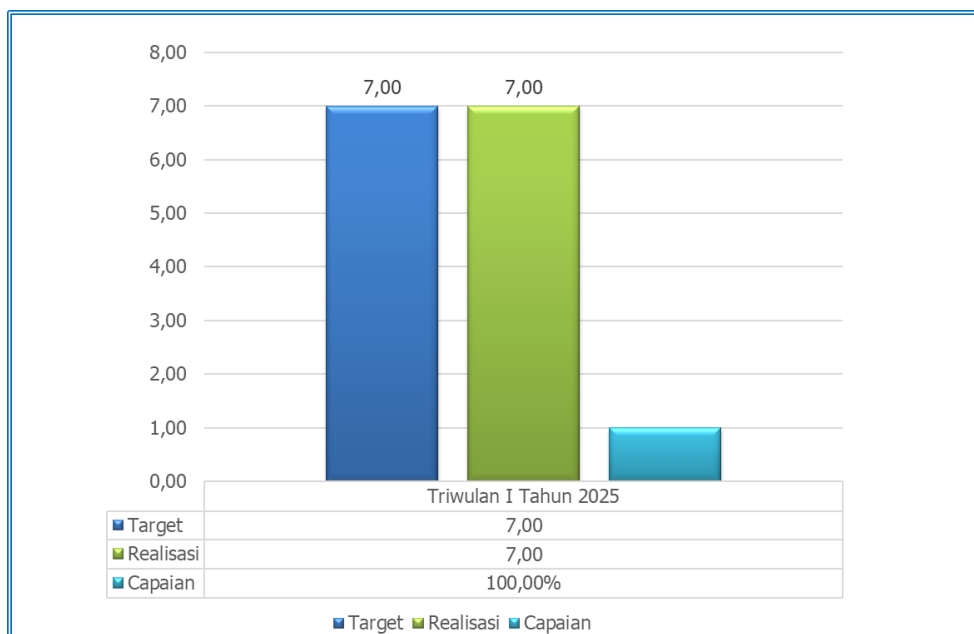
1. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
2. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
3. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
4. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
5. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
6. Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat); dan
7. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

Jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada Tahun 2025 sebanyak 7 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2.** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar II.2. Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018, PM 6 Tahun 2023 dan dan terakhir diubah dengan PM 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal Tipe-A yang beroperasi pada Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Terminal Tipe A yang dilaksanakan oleh seluruh staf di Terminal Tipe-A berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen SDM di Terminal Tipe A; dan
3. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 7 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 antara lain yaitu:

1. Tingginya antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ke berbagai media sosial; dan
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat naik dan turun penumpang dan sebagai tempat perpindahan moda.

▪ **Faktor Kegagalan**

Kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 antara lain yaitu:

1. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal belum optimal secara keseluruhan tersedia dengan baik dan layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
2. Fasilitas umum seperti toilet belum maksimal kebersihannya;
3. Kurang tersedianya air bersih di terminal; dan
4. Lokasi terminal kurang strategis dan berada di lokasi turunan/tanjakan jalan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)} \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap target yang telah ditetapkan, antara lain:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2025 sebesar Rp. 12.664.171.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 3.040.557.986,- atau mencapai 24,0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu perencanaan yang komprehensif dalam menentukan alokasi kegiatan operasional Terminal Tipe A sesuai dengan kebutuhan anggaran dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan bahwa pelayanan angkutan penyeberangan perintis merupakan angkutan penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang dilakukan untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, serta menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan.

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP, agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi jumlah trip yang dilayani angkutan penyeberangan perintis dengan target jumlah trip, dimana selanjutnya untuk memperoleh persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

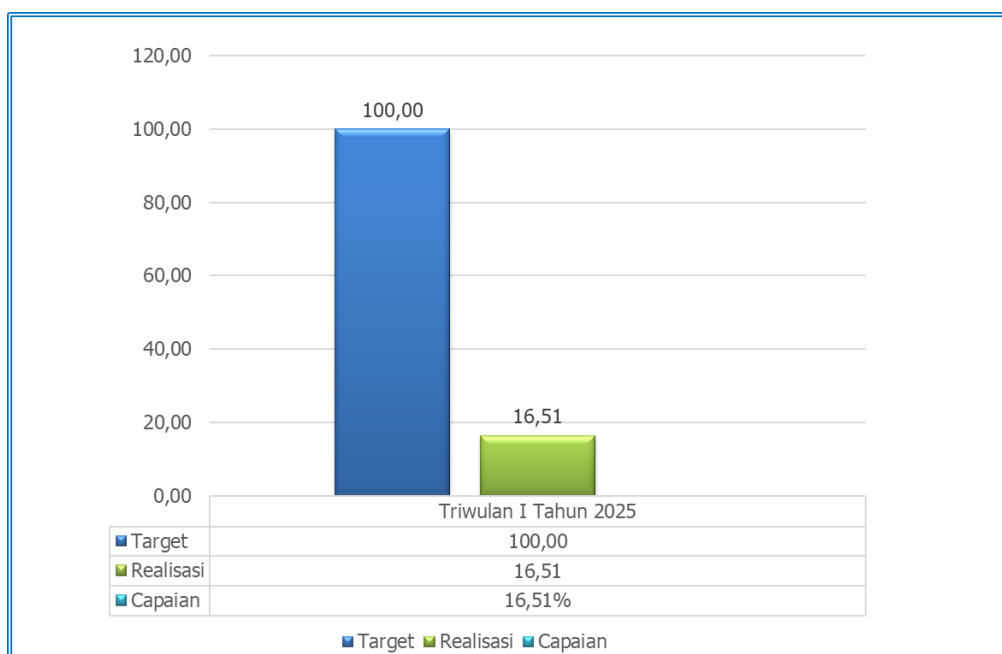
$$= \frac{\text{Realisasi kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan}}{\text{Target kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Trip yang dilayani angkutan penyeberangan adalah 1 kali perjalanan dari titik A ke titik B (1 trip). Untuk angkutan perintis penyeberangan dengan rute Sri Menanti – Karang Baru, maka Trip 1 Sri Menanti ke Karang Baru, dan Trip Ke-2 Karang Baru – Sri Menanti, sehingga terdapat 2 Trip/Hari.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada tahun 2025 sebesar 16,51% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 16,51%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3.** Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.



Gambar II.3. Grafik Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, maka ditetapkan Lintas Penyeberangan (antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan dan lintas penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota) yang berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/ atau

jaringan jalur kereta api. Selain itu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan yaitu lintas Sri Menanti – Karang Baru dengan target 1.320 trip dan kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 536 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025 dengan target 1.340 trip.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat;
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir dan belum terlayani angkutan penyeberangan;
3. Kepastian jam operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
4. Pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan pelayanan angkutan dengan pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat di daerah Sri Menanti dan Karang Baru.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut sehingga jadwal keberangkatan kapal ditunda;
2. Jadwal operasional kapal penyeberangan tidak terlalu banyak.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 yaitu sebesar 16,51% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi trip}}{\text{Jumlah target trip}} \times 100\% \text{ (dalam satuan \%)}$$

$$\% \text{ Realisasi Kinerja} = \frac{35 \text{ trip}}{212 \text{ trip}} \times 100\% = 16,51\%$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 yang diukur dari pencapaian realisasi jumlah trip pada lintas Sri Menanti – Karang Baru adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{16,51}{100} \times 100\% = 16,51\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 yaitu memiliki target anggaran senilai Rp. 3.628.283.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.779.676.000,- atau mencapai 49,1%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Penyedia terkait kendala teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran setiap bulan; dan
3. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

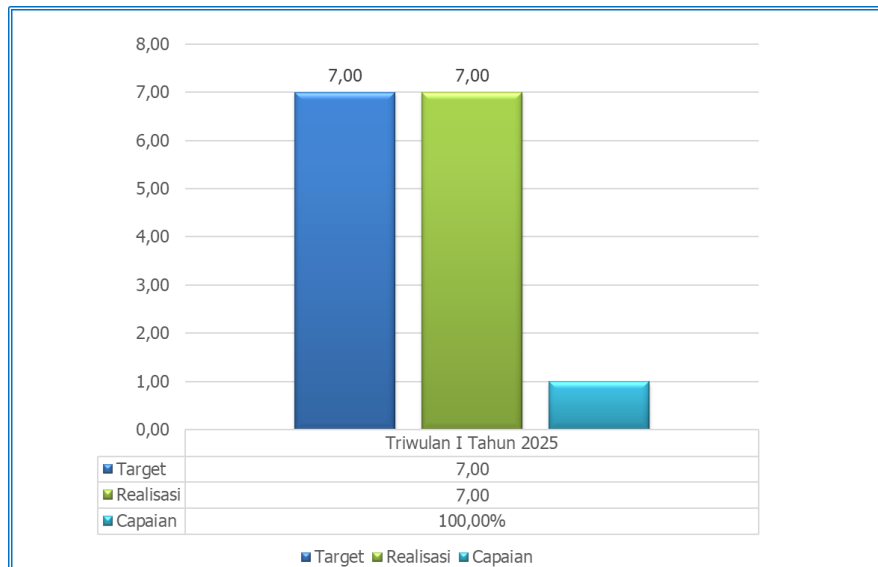
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun dan dianggarkan operasionalnya di dalam APBN.

$$\text{Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) lokasi, jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 (tujuh) lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II.4. Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 20 Tahun 2018, dimana selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 7 (tujuh) Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api (Kab. Banyuasin);
2. Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti (Kab. Banyuasin);
3. Pelabuhan Sungai Sekayu (Kab. Musi Banyuasin);
4. Pelabuhan Sungai 16 Ilir (Kota Palembang);
5. Pelabuhan Sungai 7 Ulu (Kota Palembang);
6. Pelabuhan Sungai Muara Kumbang (Kab. Ogan Ilir); dan
7. Pelabuhan Danau Banding Agung (Kab. OKU Selatan).

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat bahwa Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan berjumlah 6 (enam) Pelabuhan SDP kecuali Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai 16 Ilir tidak ada dalam PM 1 Tahun 2025. Namun dalam pelaksanaan di lapangan Satuan Pelayanan Pelabuhan 16 Ilir masih dianggarkan operasionalnya berupa penggajian SDM, sehingga jumlah pelabuhan SDP berjumlah 7 (tujuh) Lokasi, dimana hal ini tidak sesuai dengan PM 1 Tahun 2025. Untuk itu, pada saat terdapat revisi target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 akan dilakukan perbaikan sesuai dengan PM 1 Tahun 2025 dan berdasarkan dengan DIPA dan POK BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi antara lain:

1. Petugas di Pelabuhan SDP memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan instansi/stakeholder terkait; dan
3. BPTD Kelas II Sumsel selalu melaksanakan monitoring pelaksanaan operasional di pelabuhan SDP.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi antara lain:

1. Kurangnya SDM di Pelabuhan SDP;
2. Adanya kondisi alam seperti pasang air laut, cuaca dan ombak yang tinggi; dan
3. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap di Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi = 7 Lokasi

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 sebesar 7 Lokasi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga persentase capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi saat ini telah memenuhi target sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target anggaran senilai Rp. 2.840.280.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 592.749.013,- atau mencapai 20,9%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

1. percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional pelabuhan;
2. perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya pelayanan transportasi darat diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A; dan

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari 6 (enam) indikator jenis pelayanan di 7 (tujuh) Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan aspek penilaian sebagai berikut.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe – A} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A} \end{aligned}$$

Tabel II.3 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Keselamatan, Keamanan dan Keandalan/Keteraturan)

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
1. Keselamatan				
1	Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor
2	Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Keselamatan Jalan rambu marka penerangan jalan pagar
3	Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi	Ketersediaan	Tersedia jalur evakuasi
4	Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedia alat pemadam kebakaran
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Kesehatan Pos Fasilitas, dan Petugas kesehatan
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia pos fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
8	Informasi fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas
9	Informasi fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	informasi ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas
2. Keamanan				
1	Fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu
2	Media pengaduan gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca
3	Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi jasa pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat
3. Keandalan/Keteraturan				
1	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis
2	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis
3	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur
4	Kantor Penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan	Tersedia kantor penyelenggara terminal control room , dan SIM terminal
			luas	Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai
5	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

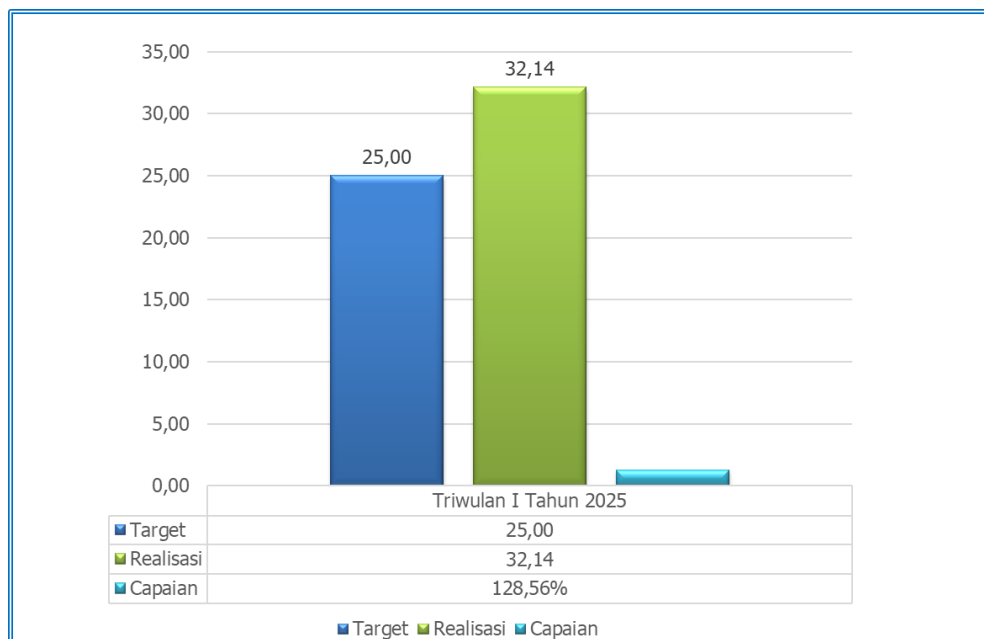
Tabel II.4 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan dan Kesetaraan)

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
4. Kenyamanan				
1	Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk
			Kondisi	Area Bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal
			Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona
			Jumlah	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel)
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
			Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)
3	Fasilitas peribadatan/mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
			Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)
4	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan
			Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman
			Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah
			Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan
6	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan petugas kebersihan
7	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan
8	Area merokok (smoking area)	Tempat khusus untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia smoking area
9	Drainase	Drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai
10	Area dengan jaringan internet (hotspot area)	Area yang tersedia jaringan internet (hotspot area)	Ketersediaan	Tersedia hotspot area
11	Ruang Baca (reading corner)	Ruang Baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (reading corner)
12	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi
5. Kemudahan/Keterjangkauan				
1	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur
			Kondisi	Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
			Keteraturan	Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain
			Kondisi	Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur
			Keteraturan	Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
			Kondisi	Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain
3	Informasi pelayanan	Visual : Denah/layout terminal. Nomor trayek, nama PO dan kelas pelayanannya. Nama terminal keberangkatan. Jadwal. Tarif. Peta jaringan Audio : Informasi pelayanan (disebutkan apa saja). Kejadian khusus dan gangguan	Tempat/ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca
			Tempat Intensitas Cahaya	Diletakkan di tempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
4	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : Jenis angkutan, lokasi angkutan lanjutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif	Tempat Kondisi	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca
			Intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
6	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan
7	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)
8	Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus
9	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
6. Kesetaraan				
1	Fasilitas penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari Toilet pengguna difabel
			Kondisi	Kursi roda difabel.
2	Ruang ibu menyusui	Ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025 sebesar 32,14% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 25%, maka capaian kinerja mencapai 128,56%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**.



Gambar II.5. Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A yaitu berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 25% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan transportasi darat;
2. Terlaksananya kegiatan monitoring pemenuhan SPM di Terminal Tipe A secara berkala; dan
3. Terwujudnya aspek pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan pelayanan kesetaraan di Terminal Tipe A dengan melakukan monitoring secara berkala.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Kendala alam seperti asap dari kebakaran hutan menyebabkan jarak pandang yang sulit terlihat jelas di akses keluar masuk kendaraan di Terminal Tipe A;
2. Kurang berkenannya penumpang untuk mengisi kuesioner terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A;
3. Kurang kesadaran penumpang untuk menjaga kebersihan di lingkungan Terminal Tipe A, padahal tempat sampah sudah disediakan di setiap sudut di Terminal Tipe A;
4. Terdapat tempat pembuangan sampah di pintu masuk Terminal Tipe A; dan
5. Terdapat bus-bus yang sudah rusak milik Pemkot Palembang yang berdekatan dengan Terminal Tipe A sehingga mengganggu estetika terminal.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025 tercapai 32,14% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana perolehan 32,14% berasal dari perhitungan jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap pemenuhan 6 (enam) indikator jenis pelayanan dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi Kinerja} = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A}$$

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A terhadap 6 (enam) indikator jenis pelayanan di Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan penilaian SPM di Terminal Tipe A dengan hasil rekapitulasi nilai (dalam satuan %) sebesar 32,14% dengan kinerja unit pelayanan E (buruk) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.5 Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Terminal Tipe A	Triwulan I			
		Januari	Februari	Maret	Nilai Rata Rata
1	Alang-Alang Lebar	51,91	58,02	58,02	55,99
2	Karya Jaya	39,52	39,52	39,52	39,52
3	Kayu Agung	24,10	24,10	24,10	24,10
4	Batu Kuning	22,21	22,21	22,21	22,21
5	Batay	36,06	36,06	36,06	36,06
6	Simpang Periuk	27,04	27,04	27,04	27,04
7	Betung	20,06	20,06	20,06	20,06
Nilai Rata-rata		31,56	32,43	32,43	32,14

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.6 Konversi Nilai Pelayanan

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 55	E	Buruk
56 - 65	D	Kurang
66 - 75	C	Cukup
76 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ Capaian Kinerja

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan sebesar 32,14%. Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Untuk itu capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A diperoleh sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{32,14}{25} \times 100\% = 128,56\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar Rp. 12.664.171.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 3.040.557.986,- atau mencapai 24,0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas di Terminal Tipe-A yang didukung oleh sistem informasi dan teknologi (*digital*);
2. Melakukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap 6 (enam) aspek di Terminal Tipe A yaitu (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan;
3. Melaksanakan pelayanan di Terminal Tipe A sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) Pelayanan di Terminal, (2) Pelayanan di Ruang Tunggu, (3) Pelayanan *Gangway*, (4) Pelayanan Kapal di Pelabuhan Penyeberangan, (5) Kendaraan di JT, (6) Kendaraan di Locket, (7) Kendaraan di Parkir Tunggu, (8) Kendaraan di Parkir Siap Muat. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan total nilai (*score*) yang diperoleh dari masing-masing pemenuhan 8 (delapan) aspek pelayanan di Pelabuhan SDP di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP} \end{aligned}$$

Tabel II.7 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A. Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan			
A.1. PELAYANAN DI TERMINAL KEBERANGKATAN PENUMPANG			
1	KESELAMATAN		
	a. Peralatan Penyelamatan Darurat:		
	a.1. Alat Pemadam Kebakaran		
		- Ketersediaan	Tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Apar bisa di pakai
		- Penempatan	Penempatan APAR Strategis
	a.2. Petunjuk Jalur Evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.3. Titik Kumpul evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedianya titik kumpul evakuasi
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.4. Informasi nomor telepon darurat		
		- Ketersediaan	Tersedianya informasi nomor telepon darurat
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Fasilitas kesehatan:		
	b.1. Perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Sesuai dengan syarat-syarat P3K
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b.2. Kursi Roda		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	alat kesehatan masih bisa dimanfaatkan
2	KEAMANAN		
	a. Petugas Keamanan Berseragam dan Identitas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Fasilitas Keamanan		
	b.1. CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
	b.2. Informasi Gangguan Keamanan		
		- Ketersediaan	Tersedianya Stiker nomor telpon pengaduan Sesuai dengan k
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
3	KENYAMANAN		
	a. WC/Kamar Mandi untuk Pria dan Wanita		
		- Ketersediaan	tersedia 1 (satu) kamar mandi/WC untuk 50 penumpang dan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam kama
	b. Tempat Ibadah Musholla dan perlengkapannya		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam Must
	c. Kantin		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam Kant
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
	e. Lajur Penumpang Keberangkatan		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah penumpang keberangkatan
		- Kondisi	
	f. Lajur Penumpang Kedatangan		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah penumpang kedatangan
		- Kondisi	

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Informasi Pelayanan		
	a.1. Denah/Layout terminal		
		- Ketersediaan	Tersedianya denah/layout pelabuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.2. Tarif Masuk		
		- Ketersediaan	tersedianya informasi biaya
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Informasi Keberangkatan, Kedatangan & Gangguan Perjalanan kapal		
	b.1. Informasi Melalui Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Audio Speaker yang disampaikan di dalam pelabuhan
		- Kondisi	informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan informasi yang disampaikan
	b.2. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pelabuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	c. Informasi Angkutan Lanjutan		
	c.1. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pelabuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	d. Fasilitas Layanan Informasi Penumpang		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pelabuhan
		- Kondisi	penempatan di tempat strategis
	e. Tempat Parkir		
	e.1. Lahan Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)		
		- Ketersediaan	Tersedianya lahan parkir roda 2
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar di waktu parkir
	e.2. Lahan Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)		
		- Ketersediaan	Tersedianya lahan parkir roda 4
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar di waktu parkir
	e.3. Lajur Masuk/Keluar Kendaraan		
		- Ketersediaan	Tersedianya Lajur pemisah keluar/masuk kendaraan
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar
	e.4. Petugas Parkir		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	f. Pelayanan Bagasi penumpang/Petugas Porter		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas yang mudah dilihat
		- Kondisi	petugas berseragam dan mudah dilihat
5	KEHANDALAN KELOMPOK		
	a. Ketersediaan Loker		
		- Kondisi	Tersedianya loket sesuai dengan kebutuhan
	b. Waktu antri di Loket		
		- Kondisi	Kurang dari 5 (lima) menit per penumpang
6	KESETARAAN		
	6.a. Fasilitas bagi penumpang cacat (difable)		
		- Ketersediaan Lajur Khusus	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A.2. PELAYANAN RUANG TUNGGU			
1	KESELAMATAN		
	a. Peralatan Penyelamatan Darurat:		
	a.1. Alat Pemadam Kebakaran		
		- Ketersediaan	Tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Apar bisa di pakai
		- Penempatan	Penempatan APAR Strategis
	a.2. Petunjuk Jalur Evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Fasilitas kesehatan:		
	b.1 Perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Sesuai dengan syarat-syarat P3K
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b.2 Klinik/Pos Kesehatan		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam klinik
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEAMANAN		
	a. Petugas Keamanan Berseragam dan Identitas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Fasilitas Keamanan		
	b.1 CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
3	KENYAMANAN		
	a. Ruang tunggu		
		- Luas	Untuk 1 (satu) orang minimum 0.5 m2
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang bersala dalam areal
	b. Fasilitas Pengatur Suhu		
		- Ketersediaan	Tersedia fasilitas pengatur suhu
		- Kondisi	Suhu dalam terminal penumpang maksimal 27 oC
	c. WC/Kamar Mandi untuk Pria dan Wanita		
		- Ketersediaan	tersedia 1 (satu) kamar mandi/WC untuk 50 penumpang dan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam kama
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Informasi Gangguan Perjalanan Kapal		
	a.1. Informasi Melalui Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Audio Speaker yang disampaikan did
		- Kondisi	informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dangan ir
	a.2. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pel
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
5	KEHANDALAN KETERATURAN		
	Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
6	KESETARAAN		
	a. Fasilitas bagi penumpang cacat (difable)		
		- Ketersediaan	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan
	b. Ruang ibu menyusui		
		- Ketersediaan	tersedianya ruang ibu menyusui
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan

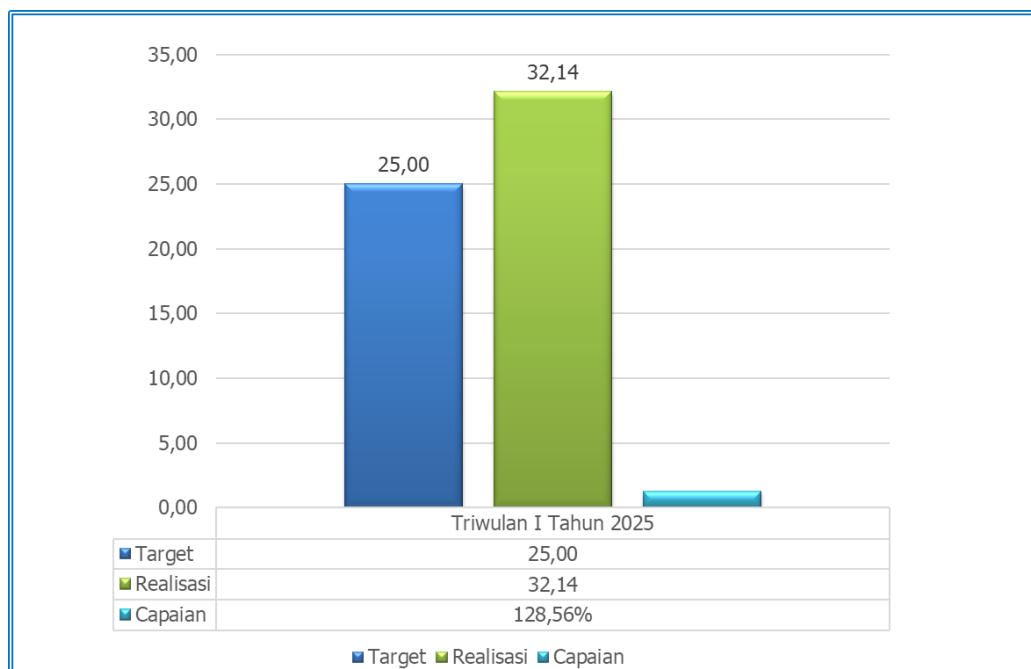
NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A.3.	PELAYANAN GANGWAY		
1	KEAMANAN		
	Fasilitas Keamanan		
	CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
2	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Penempatan	intensitas cahaya 200 - 300 lux
3	KESETERAAN		
	Fasilitas Jalur bagi penumpang cacat (difiable)		
		- Ketersediaan Lajur khusus	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difiable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan
B.	PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENY		
1	KESELAMATAN		
	Rambu-rambu		
		- Ketersediaan	Tersedia penunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KENYAMANAN		
	a. Fasilitas Sandar Kapal sesuai peraturan pemerintah		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	b. Perairan Tempat Labuh		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	c. Fasilitas Pendukung Alur Pelayaran		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
3	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas Darat		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Penempatan	penempatan petugas sesuai dengan tugasnya
	b. Kesigapan Petugas Darat		
		- Kondisi	Kesigapan petugas darat untuk membantu proses kapal datar
	c. Waktu Tunggu Masuk/Keluar Dermaga		
		- Kondisi	Lamanya kapal menunggu antrian masuk dermaga
C.	PELAYANAN KENDARAAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN		
C.1.	KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG		
1	KESELAMATAN		
	Rambu-rambu		
		- Ketersediaan	Tersedia penunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEAMANAN		
	Fasilitas Keamanan		
	- CCTV + Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
3	KENYAMANAN		
	a. Alat Penimbangan		
		- Ketersediaan	Tersedianya alat penimbang kendaraan sesuai dengan kebutu
		- Kondisi	kondisi alat penimbang
	b. Petugas Penimbangan		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Alat Penghitung Berat Kendaraan		
		- Ketersediaan	Tersedianya alat penimbang kendaraan sesuai dengan kebutu
		- Penempatan	kondisi alat penghitungan berat kendaraan
5	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Kesigapan Petugas Darat		
		- Kesigapan	Kesigapan petugas darat untuk membantu proses kapal darat
		- Kondisi	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Waktu antri di Jembatan timbang		
		- Kondisi	Lamanya mobil menunggu antrian menunggu ditimbang
C.2.	KENDARAAN DI LOKET		
1	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan		
		- Ketersediaan	Tersedia jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal
	b. Tarif Penyeberangan		
		- Ketersediaan	
		- Penempatan	
3	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Keberadaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Kondisi Berseragam dan Identitas	
	b. Jalur Pemisah Kendaraan (roda 2, Roda 4 dan Bus/truk)		
		- Penempatan	Tersedia jalur pemisah kendaraan
C.3.	KENDARAAN DI LAPANGAN PARKIR TUN		
1	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Penempatan	penempatan petugas di tempat strategis
	c. Jalur Pemisah Kendaraan (roda 2, Roda 4 dan Bus/truk)		
		- Kondisi	Tersedia jalur pemisah kendaraan
C.4.	KENDARAAN DI LAPANGAN PARKIR SIAI		
1	KENYAMANAN		
	a. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
2	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	c. Waktu antri muat		
		- Ketersediaan	Kurang dari 5 (lima) menit per penumpang
	d. Jalur Pemisah Kendaraan (Masuk dan Keluar)		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah kendaraan

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 sebesar 32,14% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 25%, maka capaian kinerja mencapai 128,56%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**.



Gambar II. 5. Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 60% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; dan
4. Memberikan sanksi tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, antara lain:

1. Pengecekan pelayanan di terminal keberangkatan penumpang, pelayanan ruang tunggu, pelayanan kapal di Pelabuhan Penyeberangan, dan pelayanan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan; dan
2. Pelaksanaan pemenuhan SPM kapal penyeberangan dan SPM pelabuhan penyeberangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain:

1. Kendala cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut;
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan; dan
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP}$$

Tabel II.8 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

No.	PELABUHAN	Triwulan I			
		Januari	Februari	Maret	Nilai Rata Rata
1	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	75,10	76,10	76,10	75,77
2	Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti	46,67	47,54	47,54	47,25
Nilai Rata-rata		60,88	61,82	61,82	61,51

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.9 Konversi Nilai Pelayanan

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 55	E	Buruk
56 - 65	D	Kurang
66 - 75	C	Cukup
76 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diperoleh dari jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP yang dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api. Berdasarkan hasil survey pelaksanaan SPM di Pelabuhan Tanjung Api-api diperoleh *total score* dari pemenuhan aspek Standar Pelayanan Minimum sebesar 61,51% dengan tingkat pelayanan minimum kategori D (Kurang).

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 61,51% sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini telah melebihi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{61,51}{60} \times 100\% = 102,52\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 sebesar Rp. 8.800.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih Rp. 0 atau mencapai 0,00%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai, danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kapal;
4. Melaksanakan pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai dengan SPM; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 3.1 : Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;

IKK 3.2 : Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 3.5 : Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;

IKK 7a : Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

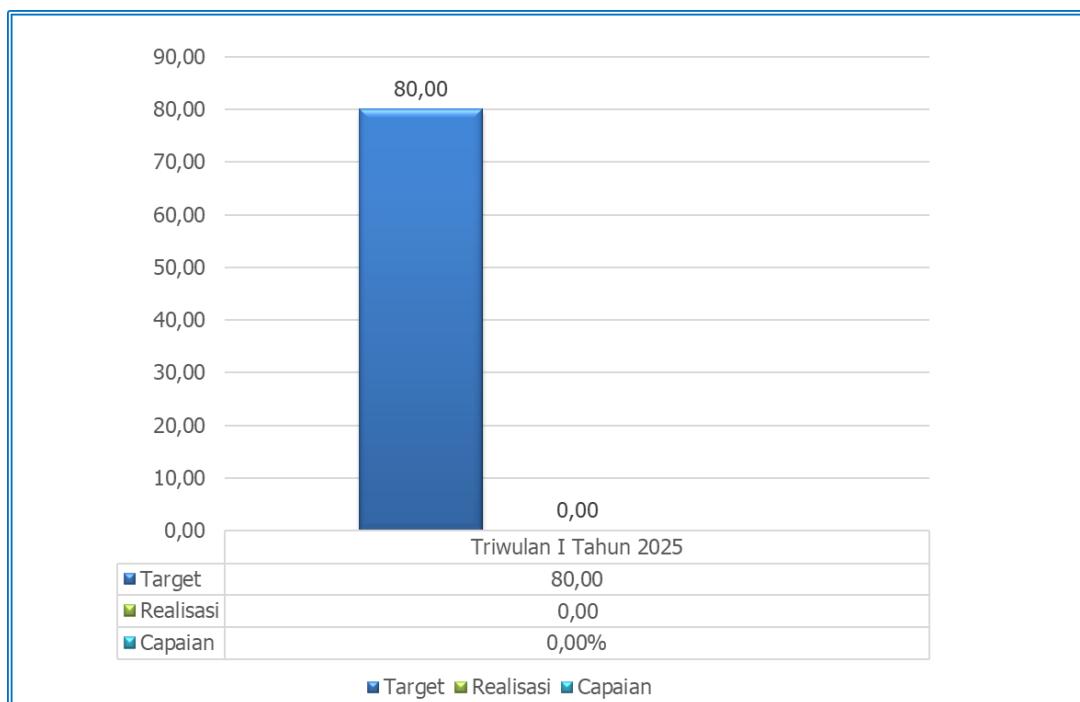
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

1. Rambu Lalu Lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat (ZOSS); dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**.



Gambar II.6. Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan dan beberapa peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Rambu Lalu Lintas (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014);
2. Marka Jalan (Marka Putih/Marka Kuning/Paku Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018);
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Warning Light /APILL*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014);
4. Alat Penerangan Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023);
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (*Delineator/Guard Rail*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023);
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (*ATCS*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018);
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat (*ZOSS*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020);
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Terpenuhinya item fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) dan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
2. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan terlaksana tepat waktu; dan
3. Alokasi anggaran perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID).

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan seperti cuaca kurang baik;
2. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan; dan
4. Blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, *refocusing* anggaran dan/atau *automatic adjustment*.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

% Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
= Jumlah realisasi item perlengkapan jalan yang terpasang di Prov.Sumsel

Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi perlengkapan jalan dengan target kebutuhan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) Tahun 2025, dimana item perlengkapan jalan yang direncanakan akan dipasang meliputi:

Tabel II.10 Kebutuhan Item Perlengkapan Jalan Berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID)

No.	Perlengkapan Jalan	Target Kebutuhan Berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) (2025 - 2029)	2025			
			Target PJ Tahun 2025	Realisasi PJ Tahun 2025	% Capaian PJ Tahun 2025	% Capaian PJ (Perbandingan Target 5 Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rambu (Buah)	2.220	768	0	0%	0%
2	APJ (Set)	2.077	55	0	0%	0%
3	Delineator (Buah)	5.574	851	0	0%	0%
4	Marka Putih (m')	18.141	3.250	0	0%	0%
5	Marka Kuning (m')	1.549	0	0	0%	0%
6	Guard Rail (m)	3.398	2.402	0	0%	0%
7	Warning Light (Set)	31	25	0	0%	0%
8	Paku Jalan (Buah)	1.213	190	0	0%	0%
9	ZOSS (Lokasi)	71	0	0	0%	0%
TOTAL		34.274	7.541	0	0	0

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0% dikarenakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I masih terkena blokir yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga capaian kinerja masih 0%.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Perlegkapan Jalan}}{\text{Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0}{80} \times 100\% = 0\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2025 sebesar Rp. 20.186.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

- Melaksanakan monitoring / pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi pemasangan dengan kebutuhan perlengkapan jalan di lapangan;
- Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait waktu pemasangan perlengkapan jalan dan alokasi kebutuhan perlengkapan jalan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) dan alokasi anggaran agar sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan; dan
- Merencanakan optimalisasi waktu dan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk di 3 (tiga) UPPKB yang beroperasi (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati). Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran daya angkut, dimensi kendaraan, persyaratan teknis, dokumen kendaraan, tata

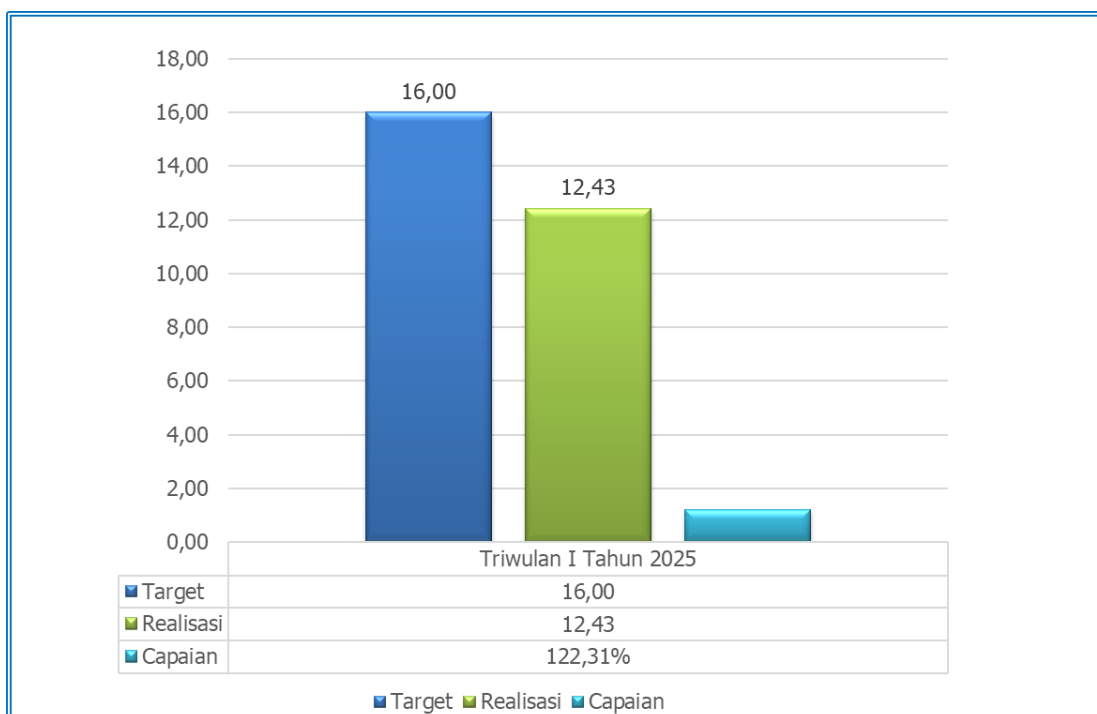
cara muat, kelas jalan yang tercatat di dalam UPPKB. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting, pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang tercatat di dalam UPPKB. Jumlah pelanggaran di UPPKB dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran per bulan.

Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 12,43% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 16%, maka capaian kinerja mencapai 122,31%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.7. Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Atas Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) di Jalan Tol.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 16% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya yaitu dengan beroperasinya UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati, dimana UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelanggaran di UPPKB.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Terlaksanakan kegiatan pengawasan terkait pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB;
2. Terlaksanakan kegiatan penegakan hukum pada angkutan barang yang melakukan pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB; dan
3. Terlaksanakan kegiatan sosialisasi dimensi dan muatan angkutan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) kepada operator angkutan barang untuk mengurangi ODOL di jalan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya pemahaman operator angkutan barang dan pengemudi terkait ketentuan dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*); dan

2. Kurangnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ODOL (*over dimension and over loading*).

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 berdasarkan data pelanggaran di UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati diperoleh realisasi pelanggaran di UPPKB sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Januari s.d. Maret 2025) sebesar 12,43% dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II. 11 Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati) Triwulan I Tahun 2025

No.	Bulan	UPPKB	Data LHR Angkutan Barang	Pelanggaran (Kendaraan)			Jumlah Pelanggaran	% Realisasi Jumlah Pelanggaran
				Daya Angkut	Dimensi	Dokumen Administrasi		
1.	Januari	Kertapati	8	2	0	0	2	25,00
		Talang Kelapa	0	0	0	0	0,00	
		Merapi	224	0	0	0	0,00	
		Jumlah	232	2	0	0	2	0,86
2.	Februari	Kertapati	2.331	344	0	137	481	20,63
		Talang Kelapa	559	0	0	0	163	29,16
		Merapi	324	3	0	1	4	1,23
		Jumlah	3.214	347	0	138	648	20,16
3	Maret	Kertapati	710	71	0	68	139	19,58
		Talang Kelapa	233	27	0	25	52	22,32
		Merapi	281	8	0	0	8	2,85
		Jumlah	1224	106	0	93	199	16,26
Rata-rata % Pelanggaran								12,43

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2025)

Pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB berdasarkan tabel di atas diperoleh rata-rata pelanggaran pada Triwulan I sebesar 12,43%, dimana dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 16%.

▪ Capaian Kinerja

Persentase capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk. Berdasarkan realisasi data kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat diperoleh hasil capaian sebesar 69,23% dengan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(16 - (12,43 - 16))}{16} \times 100\% = 122,31\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 3.241.457.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 685.581.120,- atau mencapai 21,20%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat;
2. Melaksanakan inspeksi keselamatan LLAJ atau *rampcheck* angkutan;
3. Melaksanakan penegakan hukum angkutan dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait;
4. Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada perusahaan dan *driver* angkutan.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

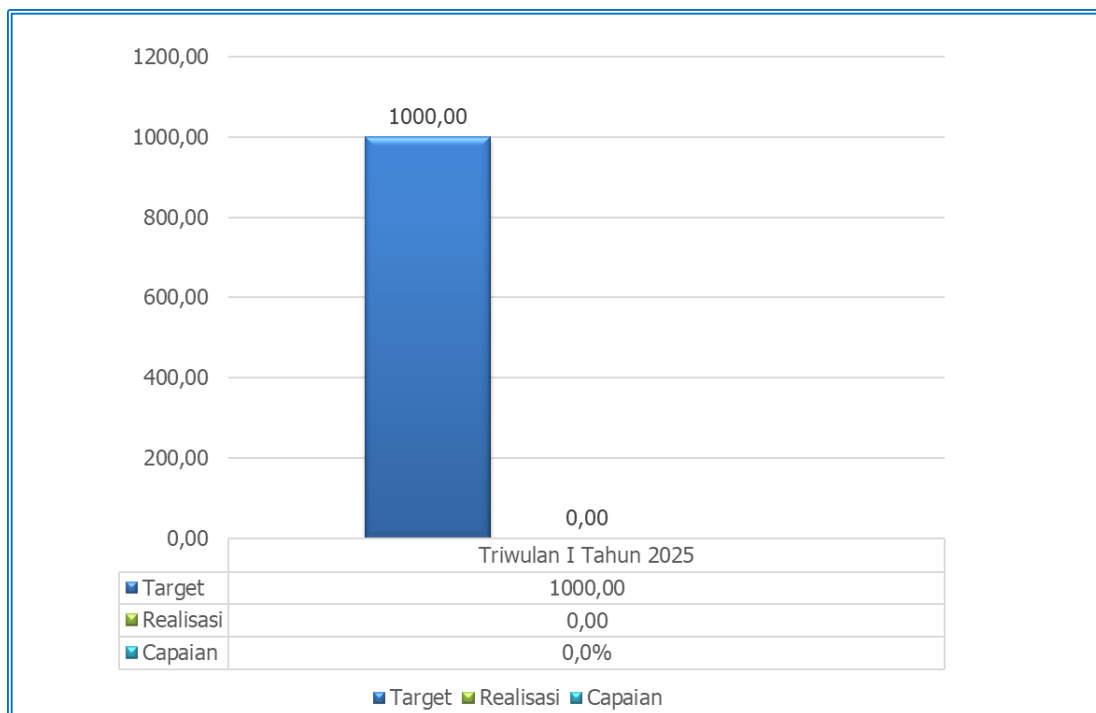
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} \\ &= \text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan} \\ &\quad (\text{dalam satuan orang}) \end{aligned}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 sebesar 0 (nol) orang jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1000 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**



Gambar II.8. Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yaitu pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b terkait Sosialisasi dan Internalisasi Tata Cara dan Etika Berlalu Lintas serta Program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 1000 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada adanya peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi target kegiatan sosialisasi keselamatan di jalan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Menurunnya angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
2. Terwujudnya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap tahun;
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, operator angkutan serta pengguna jasa angkutan memahami terkait informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kurun waktu yang singkat dikarenakan belum tersampainya informasi terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan optimal dan tidak sesuai dengan target sasaran;
2. Meningkatnya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan seperti tidak menggunakan helm dan *safety belt*; dan
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB kurang kompeten dalam menyampaikan informasi keselamatan lalu lintas di jalan kepada pengguna jasa angkutan umum dan kepada masyarakat umum.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
= Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0 (nol) orang dikarenakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum berjalan, sehingga capaian kinerja masih 0 (nol).

*Capaian Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi
Tentang Keselamatan Transportasi Jalan = 0 orang*

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 pada Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini sebesar Rp. 357.143.000,-, Dimana realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,00%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala yaitu ke operator angkutan, pengguna jasa angkutan umum serta anak usia dini; dan
2. Mengalokasikan kebutuhan anggaran sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala minimal setiap tahun.

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala.

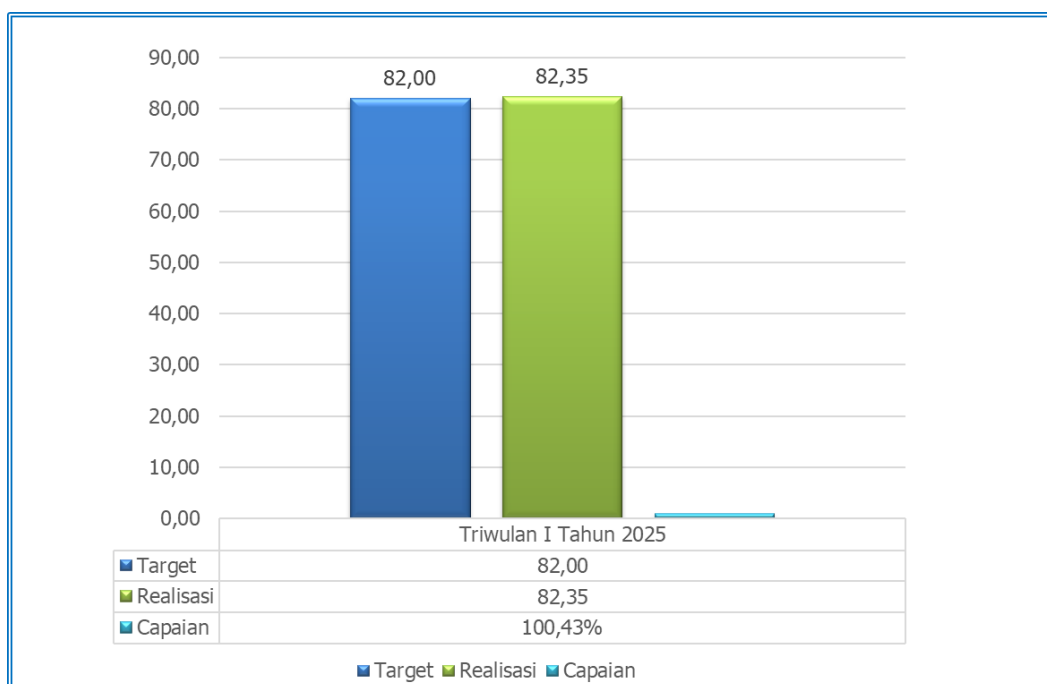
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala dilaksanakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk pelaksanaan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menjadi tugas dan fungsi BPTD pada implementasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh akreditasi UPUBKB. Adapun rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

$$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah } \frac{Kab}{Kota} \text{ di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan } \frac{Kab}{Kota} \text{ di Prov. Sumsel}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar 82,35% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 82%, maka capaian kinerja mencapai 100,43%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**.



Gambar II.9. Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 82% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kelengkapan alat uji yang akan dilakukan kalibrasi; dan
3. Peralatan yang akan diuji sudah memiliki standar teknis.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor/Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji; dan
3. Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk memenuhi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} \\ &= \frac{\text{Jumlah } \frac{Kab}{Kota} \text{ di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan } \frac{Kab}{Kota} \text{ di Prov. Sumsel}} \times 100\% \\ & \text{Realisasi Kinerja} = \frac{14}{17} \times 100\% = 82,35\% \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 merupakan kegiatan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor (UPUBKB) diberikan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPUBKB sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan yang telah memiliki akreditasi sebanyak 14 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam, serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 82,35% dikarenakan 14 Kabupaten/Kota tersebut di atas telah memiliki akreditasi UPUBKB dengan rincian akreditasi sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82,35}{82} \times 100\% = 100,43\%$$

Tabel II.12 Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Triwulan I Tahun 2025

Unit Kerja	Kabupaten/Kota	Akreditasi	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Nomor SK	Nomor Sertifikat
BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN	1 Kota Palembang	A	30 Oktober 2022	30 Oktober 2027	KP-DRJD 8871 TAHUN 2022	SR-DRJD 3137 TAHUN 2022
	2 Kab. Banyuasin	B	12 Mei 2022	12 Mei 2026	KP-DRJD 3050 TAHUN 2022	SR-DRJD 857 TAHUN 2022
	3 Kab. Musi Banyuasin	A	28 Mei 2021	28 Mei 2026	KP-DRJD 1851 TAHUN 2021	SKET-DRJD 836 TAHUN 2021
	4 Kab. Ogan Ilir	B	16 Juni 2022	16 Juni 2026	KP-DRJD 3860 TAHUN 2022	SR-DRJD 1152 TAHUN 2022
	5 Kab. OKI	B	20 Juni 2022	20 Juni 2026	KP-DRJD 4036 TAHUN 2022	SR-DRJD 1155 TAHUN 2022
	6 Kota Prabumulih	B	20 Juni 2022	20 Juni 2026	KP-DRJD 4035 TAHUN 2022	SR-DRJD 1154 TAHUN 2022
	7 Kab. OKU	B	14 Februari 2022	14 Februari 2026	KP-DRJD 595 TAHUN 2022	SR-DRJD 227 TAHUN 2022
	8 Kab. OKU Selatan	B	04 Desember 2020	04 Desember 2026	KP.5607/AJ.502/DRJD/2020	1681/SM.304/DRJD/2020
	9 Kab. OKU Timur	B	21 Desember 2022	21 Desember 2026	KP-DRJD 10615 TAHUN 2022	SR-DRJD 3739 TAHUN 2022
	10 Kab. Muara Enim	B	27 April 2022	27 April 2026	KP-DRJD 2912 TAHUN 2022	SR-DRJD 834 TAHUN 2022
	11 Kab. Lahat	B	07 November 2024	07 November 2028	KP.5162/AJ.502/DRJD/2020	1504/SM.304/DRJD/2020
	12 Kota Lubuklinggau	B	16 November 2020	16 November 2024	KP.5200/AJ.502/DRJD/2020	1535/SM.304/DRJD/2020
	13 Kab. Musi Rawas	B	06 September 2022	06 September 2026	KP-DRJD 1854 TAHUN 2022	KP-DRJD 7073 TAHUN 2022
	14 Kab. Pagar Alam	B	10 Maret 2020	10 Maret 2022	KP.1285/AJ.502/DRJD/2020	409/SM.304/DRJD/2020

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2025)

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 pada kegiatan Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis, dan Perawatan

dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 341.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Terwujudnya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Melaksanakan monitoring ke Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki akreditasi dan belum melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala;
3. Melakukan pengecekan terhadap alat uji untuk menjamin peralatan tersebut digunakan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan;
4. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dan SOP yang telah ditentukan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pengujian kendaraan bermotor melalui bimbingan teknis dan pelatihan lainnya.

Sasaran Strategis 5: SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan aspek penilaian meliputi:

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan; dan
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) beserta

turunannya (Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Monitoring Rencana Aksi), penginputan aplikasi *e-planning* dan *e-performance*.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi pegawai (pendidikan formal terakhir), kompetensi pegawai, kinerja, dan disiplin kerja.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran dinilai berdasarkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan pembobotan penilaian sebagai berikut:

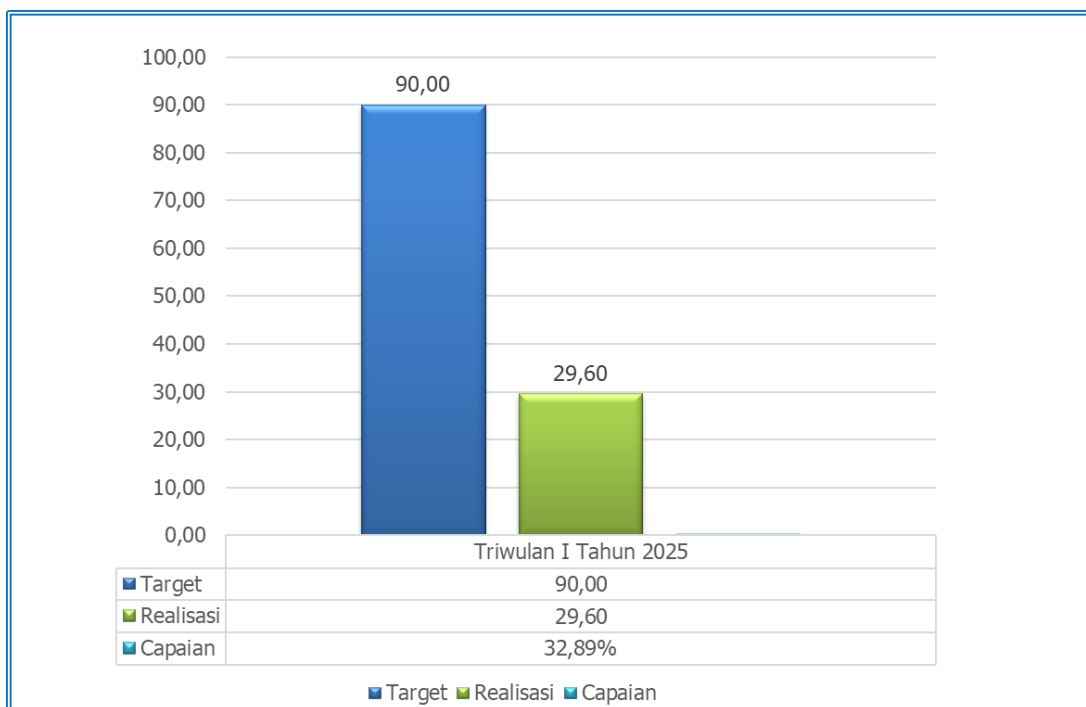
Tabel II.13 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

No.	Uraian		Bobot Nilai
(1)	(2)		(3)
A	Aspek Perencanaan:Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen per		25
	1	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)/LMCK	10
	2	Dokumen Perjanjian Kinerja	5
	3	Pengisian input e-planning	5
	4	Pengisian input e-performance	5
B	Aspek Kepegawaian:Indeks Profesionalisme ASN, meliputi:		25
	1	Kualifikasi Pegawai (Pendidikan Formal Terakhir)	6
	2	Kompetensi Pegawai	10
	3	Kinerja	6
	4	Disiplin Kerja	3
C	Aspek Keuangan:Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25
D	Aspek Penyelenggaraan Perkantoran: Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Hasil Pelaksanaan		25
Total Nilai			100

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 memiliki nilai sebesar 29,60 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar dengan nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 32,89%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11**.



Gambar II.11. Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target senilai 90,00 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang teknis, antara lain:

1. Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan;
2. Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek);
3. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat (*Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)*);
4. Pemeliharaan *Local Port Service (LPS)*;
5. Operasional dan Pemeliharaan *Tug Boat* dan Kapal Patroli; dan
6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi dan stakeholder terkait saat pelaksanaan kegiatan;
3. SDM yang memiliki integritas yang baik.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran kegiatan;
2. Tidak adanya koordinasi yang terjalin dengan baik dengan instansi dan stakeholder lainnya;
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 29,60 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah aspek pembobotan penilaian sebagai berikut:

Tabel II.14 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

No.	Uraian		Bobot Nilai	Nilai Triwulan I		
				Januari	Februari	Maret
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Aspek Perencanaan:Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen per		25	4,535	5,57	5,98
	1	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)/LMCK	10	2	2	2
	2	Dokumen Perjanjian Kinerja	5	1,5	1,5	1,5
	3	Pengisian input e-planning	5	0,625	1,25	1,25
	4	Pengisian input e-performance	5	0,41	0,82	1,23
B	Aspek Kepegawaian:Indeks Profesionalisme ASN, meliputi:		25	14,25	14,25	14,25
	1	Kualifikasi Pegawai (Pendidikan Formal Terakhir)	6	3,25	3,25	3,25
	2	Kompetensi Pegawai	10	6	6	6
	3	Kinerja	6	3,25	3,25	3,25
	4	Disiplin Kerja	3	1,75	1,75	1,75
C	Aspek Keuangan:Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25	2,08	3,12	3,12
D	Aspek Penyelenggaraan Perkantoran: Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Hasil Pelaksanaan		25	6,25	6,25	6,25
Total Nilai			100	27.12	29,19	29.60

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{29,60}{90} \times 100\% = 32,89\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 38.538.731.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 131.171.990,- atau mencapai 1,36%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah masuk dan keluar serta mengkoreksi naskah dinas agar sesuai aturan yang berlaku;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik sesuai dengan pola kearsipan; dan
4. Menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran dihitung berdasarkan:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran yang dihitung berdasarkan:
 - a) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) (Jumlah Kursi dan Meja di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf);
 - b) Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) (Jumlah PC atau Laptop di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf); dan
 - c) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) Rata-rata Kecepatan Internet/Standar Kecepatan Internet;
2. Tingkat Ketersediaan Barang Milik Negara (BMN) ya dihitung berdasarkan Tingkat ketersediaan BMN telah/belum sesuai dengan Perencanaan kebutuhan anggaran BMN dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga (Jumlah Rencana Kebutuhan BMN / Jumlah Realisasi BMN).

Aspek penilaian pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan pembobotan sebagai berikut:

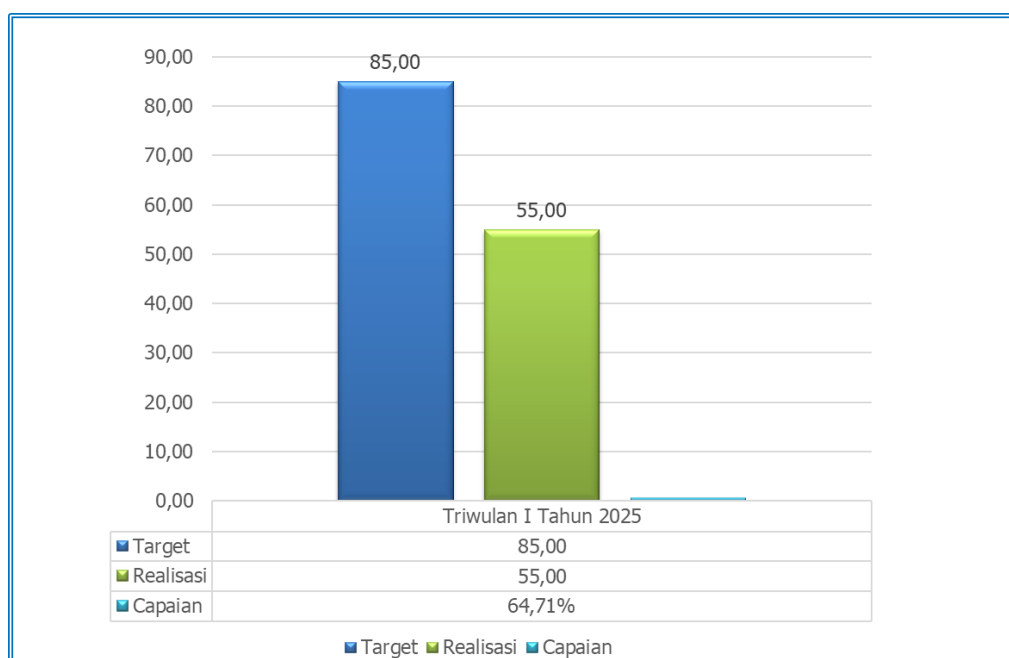
Tabel II.15 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

No.	Uraian		Bobot Nilai
(1)	(2)		(3)
A	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		65
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) (Jumlah Kursi dan Meja di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	25
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) (Jumlah PC atau Laptop di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	20
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) Rata-rata Kecepatan Internet/Standar Kecepatan Internet	20
B	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Negara (BMN)		35
	1	Tingkat ketersediaan BMN telah/belum sesuai dengan Perencanaan kebutuhan anggaran BMN dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga (Jumlah Rencana Kebutuhan BMN / Jumlah Realisasi BMN)	35
Total Nilai (A+B)			100

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 memiliki nilai 55,0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 85,0 maka capaian kinerja mencapai 64,71%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.12**

**Gambar II.12.** Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel memiliki target 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Adapun beberapa pelayanan perkantoran sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas perkantoran pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor serta layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan kinerja; dan
2. Ketersediaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan pPerencanaan kebutuhan anggaran BMN dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berintegritas dan berkompeten;
2. Komunikasi internal antar pegawai berjalan dengan baik;
3. Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan sesuai jadwal; dan
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang memiliki integritas yang baik dan tidak berkompeten;
2. Tidak terjalannya komunikasi antar pegawai di masing-masing sub bagian/seksi; dan
3. Kurangnya dukungan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 55,0 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah hasil penilaian sebagai berikut.

Tabel II.16 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

No.	Uraian	Bobot Nilai	Nilai Triwulan I		
			Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	65	50	50	50
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) (Jumlah Kursi dan Meja di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	25	25	25	25
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) (Jumlah PC atau Laptop di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	20	20	20	20
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) Rata-rata Kecepatan Internet/Standar Kecepatan Internet	20	5	5	5
B	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Negara (BMN)	35	5	5	5
1	Tingkat ketersediaan BMN telah/belum sesuai dengan Perencanaan kebutuhan anggaran BMN dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga (Jumlah Rencana Kebutuhan BMN / Jumlah Realisasi BMN)	35	5	5	5
Total Nilai (A+B)		100	55,0	55,0	55,0

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{55}{85} \times 100\% = 64,71\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 memiliki target anggaran senilai Rp. 32.484.581.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 9.045.152.462,- atau mencapai 27,84%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.2.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 118.580.021.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.17 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	87.005.931.000	73,37%
PNBP	Rp.	31.574.090.000	26,63%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Tabel II.18 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	27.053.402.000	22,81%
Belanja Barang	Rp.	46.478.599.000	39,20%
Belanja Modal	Rp.	45.048.020.000	37,99%
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Tabel II.19 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I Tahun 2025

RM	Rp.	87.005.931.000	73,37%
PNBP	Rp.	31.574.090.000	26,63%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: Analisa dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.20 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan I Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	27.053.402.000	22,81%
Belanja Barang	Rp.	46.478.599.000	39,20%
Belanja Modal	Rp.	45.048.020.000	37,99%
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: Analisa dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-293/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi Ke-4) bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdapat revisi anggaran berupa buka blokir catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas. Untuk revisi anggaran pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah dilakukan 2 (dua) kali revisi pada akun anggaran, namun tidak merubah nilai pagu anggaran Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 118.580.021.000,-. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.21 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000
REVISI KE-1	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000
REVISI KE-2	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000

Sumber: Analisa dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.22 Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000
REVISI KE-1	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000
REVISI KE-2	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.23 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I
Belanja Pegawai	27.053.402.000	-	27.053.402.000
Belanja Barang	46.478.599.000	-	46.478.599.000
• RM	45.184.329.000	-	45.184.329.000
• PNBPN	1.294.270.000	-	1.294.270.000
Belanja Modal	45.048.020.000	-	45.048.020.000
• RM	14.768.200.000	-	14.768.200.000
• PNBPN	30.279.820.000	-	30.279.820.000
• SBSN	-	-	-
TOTAL	118.580.021.000	-	118.580.021.000

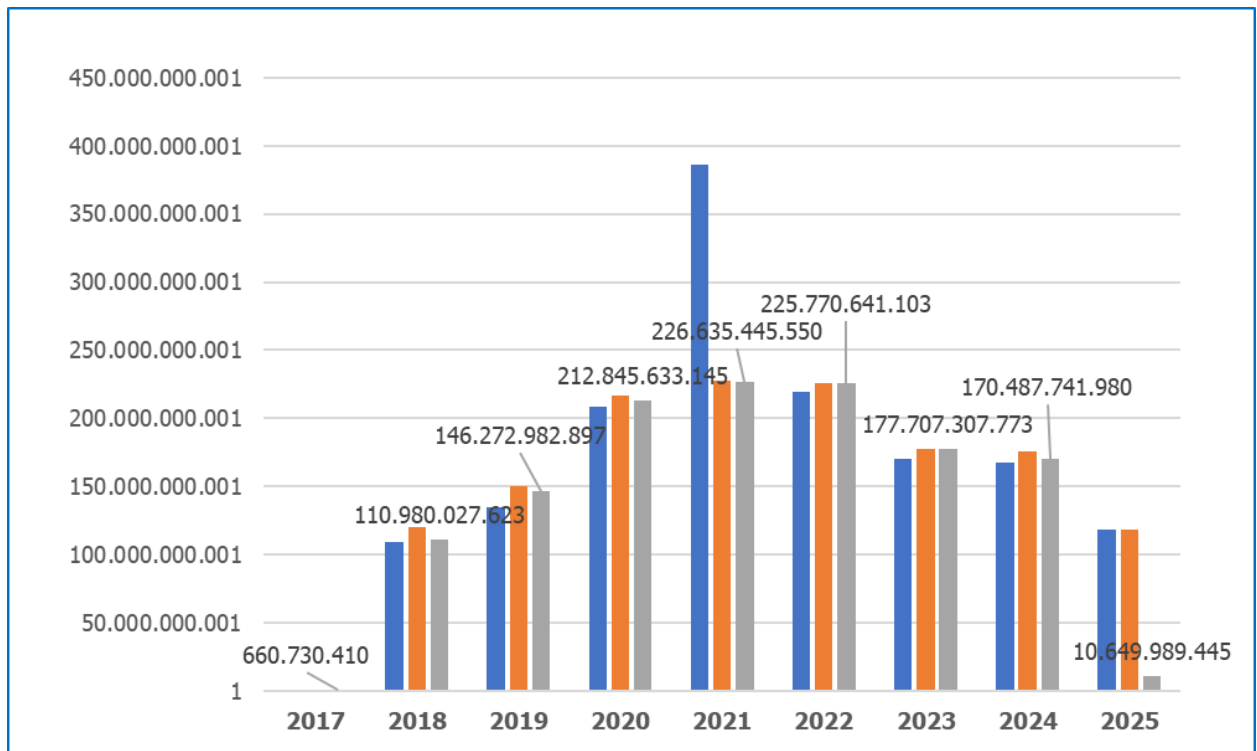
Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.24 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1.	2017	669.817.000	660.730.410	98,64
2.	2018	120.528.305.000	110.980.027.623	92,08
3.	2019	150.004.623.000	146.272.982.897	97,51
4.	2020	216.371.699.000	212.845.633.145	98,37
5.	2021	227.713.955.000	226.635.445.550	99,53
6.	2022	225.939.345.000	225.770.641.103	99,73
7.	2023	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99
8.	2024	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82
9.	2025	118.580.021.000	10.649.989.445	8,98



Gambar II.13 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2022 anggaran yang terserap sebesar Rp 225.770.641.103,- atau mencapai 99,73% dari pagu akhir Rp 225.939.345.000,. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan daya serap anggaran yaitu sebesar Rp. 177.707.307.773,- atau mencapai 99,99% dimana hal ini terjadi pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya. Lalu pada Tahun 2024 terjadi penurunan penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 170.487.741.980,- atau mencapai 96,82% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pada periode Triwulan I Tahun 2025 penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.649.989.445,- (8,98%).

II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.2.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.25 Kegiatan Program Yang Ada dalam DIPA Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER	TRIWULAN I	
			TRIWULAN I	REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	118.580.021.000	118.580.021.000	10.649.989.445	8,98%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	85.967.440.000	85.967.440.000	2.869.216.692	3,34%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.197.678.000	34.197.678.000	0	0,00%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	19.754.451.000	19.754.451.000	2.151.597.135	10,89%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	26.783.621.000	26.783.621.000	666.414.557	2,49%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.231.690.000	5.231.690.000	51.205.000	0,98%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	32.612.581.000	32.612.581.000	7.780.772.753	23,86%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.559.179.000	5.559.179.000	426.226.190	7,67%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	27.053.402.000	27.053.402.000	7.354.546.563	27,19%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.649.989.445,-** atau mencapai **8,98%** dari total pagu sebesar **Rp. 118.580.021.000,-**.

II.2.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah dianalisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.26 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	TRIWULAN I	
		REALISASI	%
Belanja Pegawai	27.053.402.000	7.354.546.563	27,19
Belanja Barang	46.478.599.000	3.295.442.882	7,09
· RM	45.184.329.000	3.295.442.882	7,29
· PNBP	1.294.270.000	-	-
Belanja Modal	45.048.020.000	-	-
· RM	14.768.200.000	-	-
· PNBP	30.279.820.000	-	-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	118.580.021.000	10.649.989.445	8,98

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 pada Triwulan I sebesar **8,98%** dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 118.580.021.000,-.



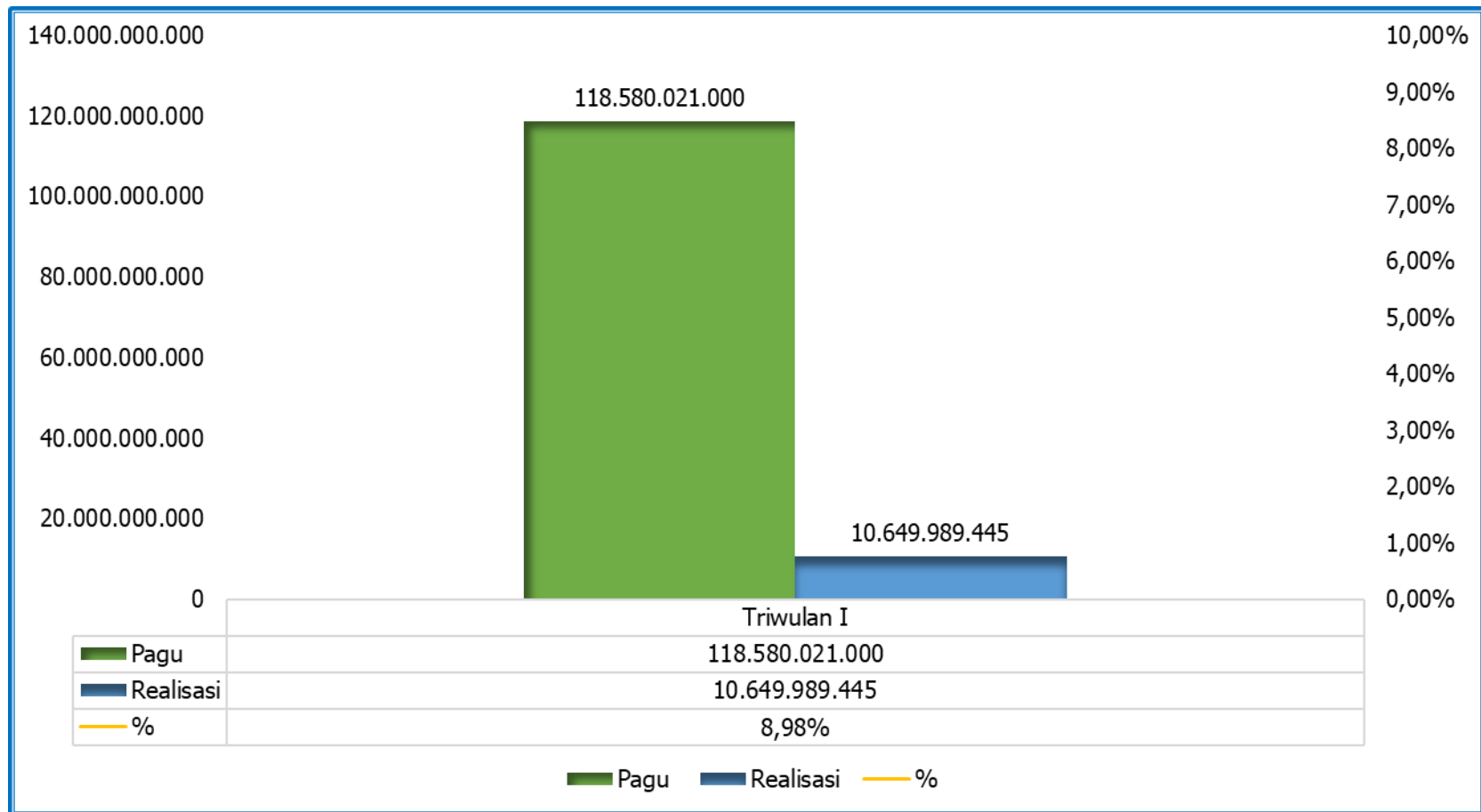
II.2.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah dianalisis per Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.27 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025

No.	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
			Rp.	%
1	· RM	87.005.931.000	10.649.989.445	12,24%
2	· PNB	31.574.090.000	0	0
3	· SBSN	0	0	0
TOTAL		118.580.021.000	10.649.989.445	8,98%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Gambar II.14 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar **8,98%**.

II.2.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.28 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	27.053.402.000	7.354.546.563	19.698.855.437
2	Belanja Barang	46.478.599.000	3.295.442.882	43.183.156.118
3	Belanja Modal	45.048.020.000	0	45.048.020.000
TOTAL		118.580.021.000	10.649.989.445	107.930.031.555

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.29 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	87.005.931.000	10.649.989.445	76.355.941.555
2	PNBP	31.574.090.000	0	31.574.090.000
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		118.580.021.000	10.649.989.445	107.930.031.555

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.30 Efisiensi Anggaran

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan I)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	68,85%	139,19%	-70,34%
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	115,54%	48,02%	67,52%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	55,69%	21,15%	34,54%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	32,89%	1,36%	31,53%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	64,71%	111,38%	-46,67%
TOTAL		67,53%	64,22%	3,31%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 67,53%, dengan realisasi anggaran sebesar 64,22% menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 3,31%.

II.2.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan/kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain adanya pelaksanaan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Menteri Perhubungan Nomor KU 001/1/3/MHB 2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025; dan
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas TA. 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



BAB III

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2025. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 6,56 (target 100,0);
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 16,51 (target 100,0);
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 32,14 (target 25,0);
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 61,51 (target 60,0);
7. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0,0 (target 80,0);
8. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 16,0 (target 12,43);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0,0 (target 1000,0);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 82,35 (target 82,0);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 29,60 (target 90,0); dan
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 55,0 (target 85,0).





Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Penanggung Jawab

Hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi darat dan keterpaduan antarmuda transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	6,56	6,56%	Belum Tercapai	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	Tercapai	Memastikan dan memonitor secara berkala pelaksanaan operasional di	Seksi Prasarana
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	16,51	16,51	Belum Tercapai	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	Tercapai	Memastikan dan memonitor secara berkala pelaksanaan operasional di Pelabuhan SDP yang telah beroperasi	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	25	25	32,14	128,56%	Tercapai	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A secara berkala	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	61,51	102,52%	Tercapai	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	0	0,0%	Belum Tercapai	Memastikan dan memonitor secara berkala alokasi anggaran yang dikarenakan pemblokiran efisiensi anggaran	Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	16	12,43	122,31%	Belum Tercapai karena kinerja kurang baik akibat peningkatan pelanggaran	Memonitor secara berkala pelaksanaan pelanggaran di UPPKB yang beroperasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan penimbangan kendaraan bermotor	Seksi Lalin
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1000	0	0,0%	Belum Tercapai	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif terhadap target jumlah Masyarakat yang akan disosialisasikan	Seksi Sarana
			IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	82	82,35	100,43%	Tercapai	Melakukan pendampingan Ditjen Hubdat pada pelaksanaan standarisasi pengujian	Seksi Sarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) ke Kab/Kota di Prov. Sumsel yang memiliki UPUBKB dan melakukan kalibrasi alat uji	
4	SK5	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90	29,60	32,89%	Belum Tercapai	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	• Sub Bagian Tata Usaha • Seksi Lalin • Seksi Sarana • Seksi Prasarana
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	55	64,71%	Belum Tercapai	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



LAMPIRAN



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

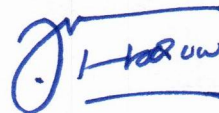


RENCANA KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Palembang, 2 Desember 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	06/01/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	06/01/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	06/01/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	06/01/2025	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	06/01/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	06/01/2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

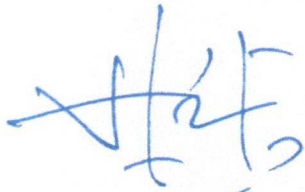
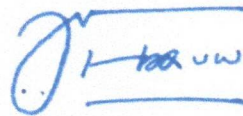
Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanAHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

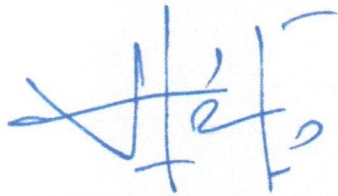
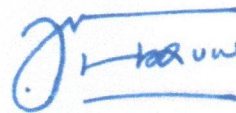
Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanAHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tulus Raharjo, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, *dr* Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680116 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan

MILFER JONELIY, S.Kom., M.Si.
NIP.19760215 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

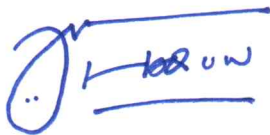
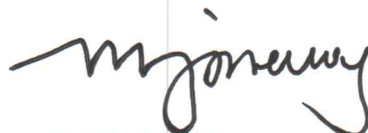
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

MILFER JONELIY, S.Kom., M.Si.
NIP.19760215 200701 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herry Saputra, S.SiT., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

HERRY SAPUTRA, S.SiT., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Jalan Nasional	%	100
		IKK1.3	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

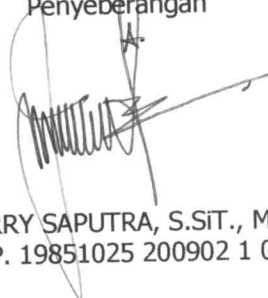
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan



HERRY SAPUTRA, S.Si., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliana Y.S. Panjaitan

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	25
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan




NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

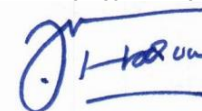
YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	1 Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan nasional	%	100	Penyelenggaraan Keberintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4,289,575,000	4,289,575,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		2 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12,664,171,000	12,664,171,000	- Seksi Prasarana
		3 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	3,628,283,000	3,628,283,000	- Seksi Prasarana
		3 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2,840,280,000	2,840,280,000	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	12,664,171,000	12,664,171,000	Seksi Prasarana
		2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Angkutan Penyeberangan	6.66	13.33	20	26.66	33.33	40	46.66	53.33	60	66.66	73.33	80	8,800,000	8,800,000	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1 Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,250,000,000	20,186,000,000	Seksi Lalin
					2 Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	1,728,000,000		
					3 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	3,360,000,000		
					4 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	10	20	30	40	50	70	80	80	80	80	80	80	13,848,000,000		
		2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	1.3	2.66	4	5.33	6.66	8	9.33	10.66	12	13.33	14.66	16	3,241,457,000	3,241,457,000	Seksi Lalin
		3 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1 Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	250,000,000	250,000,000	Seksi Sarana
					2 Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	107,143,000	107,143,000	Seksi Sarana
		1 Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan				0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	11,000,000	11,000,000	Seksi Sarana

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	2 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	75,700,000	75,700,000	Seksi Sarana
					3 Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	254,300,000	254,300,000	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	5,211,890,000	38,538,731,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
					2 Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	26,279,820,000		
					3 Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	4,000,000,000		
					4 Pemeliharaan Local Port Service	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	250,000,000		
					5 Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	2,669,021,000		
					6 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	128,000,000		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	5,431,179,000	32,484,581,000	Subbag Tata Usaha
					2 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	27,053,402,000		Subbag Tata Usaha

Palembang, 6 Januari 2025
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST.MT.
NIP. 19711116 199803 1 002

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
										Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
										Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel		Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	8	8%	357,464,583	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A		Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	1,055,347,583	8%	7	79,955,552	100.0%	0.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.4	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru		Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru	8	100%	302,356,917	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	236,690,000	8%	7	43,951,059	100.0%	1.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A		Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	2	8%	1,055,347,583	8%	2	79,955,552	100.0%	0.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan		Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	5	8%	733,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	10	7%	104,166,667	8%	10	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2)	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan		7%	144,000,000	8%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan		7%	280,000,000	8%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan		7%	1,154,000,000	8%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB		Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension</i> and <i>Over Loading (ODOL)</i>	1.3	1%	270,121,417	8%	1.3	45,973,508	100.0%	1.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1)	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	20,833,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Laporan Kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	8,928,583	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

			IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	916,667	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
							2	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	6,308,333	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
							3	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	21,191,667	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	0	0%	434,324,167	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lain -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek	0	0%	2,189,985,000	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3	Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Tersedianya Public Transport Information System (PTIS)	0	0%	333,333,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						4	Pemeliharaan Local Port Service	Laporan Progres Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service	Tersedianya Local Port Service	0	0%	20,833,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli	0	0%	222,418,417	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Data Realiasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi	0	0%	10,666,667	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	0%	452,598,250	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	0%	2,254,450,167	8%	8	3,362,293,911	100.0%	12.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	16	17%	714,929,167	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	7	100%	2,110,695,167	17%	7	1,174,694,252	100.0%	9.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	16	100%	604,713,833	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	7	100%	473,380,000	17%	7	321,315,019	100.0%	11.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	4	17%	2,110,695,167	17%	31.56	1,174,694,252	789.0%	9.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	10	17%	1,466,667	17%	60.89	0	608.9%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	20	13%	208,333,333	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan		13%	288,000,000	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan		13%	560,000,000	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan		13%	2,308,000,000	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Data Pelanggaran UPPKB	2.6	3%	540,242,833	17%	26	457,097,004	1000.0%	14.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
			Jumlah masyarakat			1) Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	0	0%	41,666,667	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

		IKK 3.5	yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Laporan Kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	17,857,167	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	10	14%	1,833,333	17%	76.50%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		14%	12,616,667	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						3	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		14%	42,383,333	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	8	15%	868,648,333	17%	26.61	51,205,000	332.6%	1.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek		15%	4,379,970,000	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3	Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Tersedianya Public Transport Information System (PTIS)		15%	666,666,667	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						4	Pemeliharaan Local Port Service	Laporan Progres Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service	Tersedianya Local Port Service		15%	41,666,667	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli		15%	444,836,833	17%		8	40,200,640	100.0%	1.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif
						6	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Data Realisasi Pelaksanaan Perangkat PPID	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Informasi		15%	21,333,333	17%		0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	8	14%	905,196,500	17%	20.80	325,760,315	260.0%	6.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	8	14%	4,508,900,333	17%	20.80	5,617,848,585	100.0%	20.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %				
								Volume	%	Volume	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Bersentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Kumulatif persentase produksi ritase keperintisan angkutan jalan	24	25%	1.072.393.750	25%	6,56	1.941.614.955	27,3%	45,3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin Seksi Sarana	
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	3.166.042.750	25%	7	3.040.557.986	100,0%	24,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Kumulatif persentase trip angkutan penyeberangan	Terpenuhinya pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Sumatera Selatan	24	100%	907.070.750	25%	16,51	1.779.676.000	68,8%	49,1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	710.070.000	25%	7	592.749.013	100,0%	20,9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	6	25%	3.166.042.750	25%	32,14	3.040.557.986	535,7%	24,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	15	25%	2.200.000	25%	61,51	0	410,1%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah rata-rata persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	25	20%	312.500.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2)	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan			20%	432.000.000	25%		0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			20%	840.000.000	25%		0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel			20%	3.462.000.000	25%		0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Jumlah rata-rata persentase angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan dilakukan tindakan penilangan di UPPKB yang beroperasi	Tercapainya penurunan pelanggaran <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i> pada angkutan barang yang masuk ke UPPKB	4	4%	810.364.250	25%	157,38	685.581.120	-3734,5%	21,2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1) Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi keselamatan transportasi jalan	Terlaksananya kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ)	0	0%	62.500.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2) Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	26.785.750	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1) Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	15	21%	2.750.000	25%	100,00%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2) Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis				21%	18.925.000	25%		0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						3) Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor				21%	63.575.000	25%		0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	Terlaksananya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	16	23%	1.302.972.500	25%	26,50	51.205.000	165,6%	1,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2) Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)		23%	6.569.955.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3) Pengadaan <i>Public Transport Information System (PTIS)</i>		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan <i>Public Transport Information System (PTIS)</i>		23%	1.000.000.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						4) Pemeliharaan <i>Local Port Service</i>		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan <i>Local Port Service (LPS)</i>		23%	62.500.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5) Operasional dan Pemeliharaan <i>Tug Boat</i> dan Kapal Patroli		Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli		23%	667.255.250	25%	3,125	79.966.990	19,5%	3,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi		23%	32.000.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
5	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Nilai Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Ketersediaan BMN	Terlaksananya Penilaian Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Tingkat Ketersediaan BMN	16	21%	1.357.794.750	25%	55,00	442.876.190	343,8%	8,2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)			16	21%	6.763.350.500	25%	55,00	8.602.276.272	100,0%	31,8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha